

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Hak Asasi Perempuan dan masalah perempuan selalu menjadi topik perhatian khusus. Menurut informasi terbaru yang dirilis oleh Biro Catatan Kejahatan Nasional, pelanggaran hak-hak perempuan telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir tercatat 2,24 juta pelanggaran terhadap perempuan. Kalimat “kejahatan terhadap perempuan” dapat didefinisikan sebagai kekejaman fisik atau mental yang segera atau berbeda terhadap perempuan. Kekerasan, yang secara khusus dikoordinasikan terhadap perempuan di mana hanya perempuan yang menjadi korban yang tidak bahagia dan menderita.

Perilaku kekerasan laki-laki terhadap perempuan telah menjadi perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir di seluruh dunia. Setiap hari jumlah kejahatan terhadap perempuan meningkat pesat dan menjadi perhatian dalam komunitas global. Terlepas dari jenis kejahatan terhadap perempuan. Saat ini, penyebab kejahatan merupakan isu yang mulai menarik banyak perhatian para peneliti secara global. Peningkatan tingkat kejahatan diyakini merugikan penduduk dalam fisik, psikologis dan ekonomi mereka. Di India, 39 kejahatan dilaporkan terhadap perempuan setiap jam 7 menurut Laporan Kejahatan di India pada tahun 2016 oleh Biro Catatan Kejahatan Nasional. (Ragunathan & Devarasan, 2019).

Dilaporkan oleh 550 pakar bahwa India merupakan negara mempunyai banyak permasalahan diskriminasi terhadap perempuan, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, kerja paksa, pernikahan dini, serta perbudakan

seksual. dan lebih memilukan, di India terdapat bermacam resiko yang dialami perempuan akibat adat istiadat setempat, seperti mutilasi kelamin pada perempuan. Berdasarkan Informasi pemerintah setempat melaporkan permasalahan kejahatan terhadap perempuan bertambah 83% persen pada tahun 2007 sampai saat ini. (*India Negara Paling Berbahaya Di Dunia.Html*, n.d.)

India harus memprioritaskan perempuan agar anak perempuan tidak dipaksa untuk menikah dini. Mereka tidak diharuskan menikah untuk mendapatkan status sosial dan ekonomi. Namun menaikkan usia minimum untuk menikah menjadi usia 21 tentu akan menjadi bumerang. Usia minimum untuk menikah bukan berarti usia wajib. Ini hanya menunjukkan bahwa di bawah usia ini dapat dituntut secara pidana berdasarkan undang-undang perkawinan anak. *Unicef Records* memperkirakan bahwa setidaknya 15 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun menikah setiap tahun di India rumah bagi beberapa pengantin anak terasar di dunia yang mewakili sepertiga dari total dunia. Dimana hampir 16% wanita muda berusia 15-19 tahun di India kini sudah menikah (*Pandemi Dan Pernikahan Dini Di India - Sabakota Id.Html*, n.d.).

Kepahitan hidup bagi bayi perempuan di India, bahkan orang tua kandung mengubur anak perempuannya hidup-hidup agar mati. Banyak keluarga yang lebih mementingkan bayi laki-laki dibandingkan bayi perempuan hal ini sangat timpang antar kedua jenis kelamin tersebut. Menurut seorang dokter spesialis kandungan dari India pembunuhan terhadap bayi perempuan dilakukan ketika bayi sudah lahir maupun bayi masih dalam kandungan hal ini banyak terjadi di India. Aborsi pada bayi perempuan semakin banyak terjadi sejak tahun 1970-an ketika USG sudah tersedia di India karena dapat melihat gender bayi tersebut dari sebelum dilahirkan,

walaupun aborsi sudah dilarang di India pada 199 namun hal ini tidak dapat dihindari bagi keluarga yang tidak menginginkan anak perempuan (*Bayi Perempuan Hidup Walau Sudah 2 Hari Dimasukkan Ke Liang Kubur Di India.Html*, n.d.).

India wilayah bagian utara digemparkan oleh data terbaru yg menyebutkan tidak ada bayi perempuan lahir pada 132 desa pada tiga bulan terakhir. Dikhawatirkan sudah terjadi aborsi untuk memilih jenis kelamin. Data yang diungkap menyebutkan ada 947 anak lahir pada 500 desa pada distrik Uttarkashi, daerah Uttarakhand. dari lebih kurang 200 kelahiran pada 132 desa, sama sekali tidak ada bayi perempuan sehingga pemerintah setempat menduga 132 desa tadi menjadi 'zona merah'. Aborsi menggunakan untuk memilih kelamin anak, hal ini adalah tindakan ilegal di India. Keluarga yang terbukti melakukan hal tersebut akan mendapat sanksi. Pada tahun sebelumnya pemerintah India melaporkan temuan sekitar 63 juta perempuan secara statistik 'hilang' berasal populasi dinegaranya diperkirakan karena kecenderungan menentukan punya anak dalam budaya patriarki pada negara India. Anak laki-laki dianggap lebih membawa rezeki. jadi, punya anak perempuan dianggap rugi karena wajib membayar mahar saat menikah walaupun praktik ini telah tidak boleh semenjak 1961 (*Misterius! Dalam 3 Bulan, Tak Ada Bayi Perempuan Lahir Di 132 Desa Di India.Html*, n.d.).

Kemudian sistem Dowry yang mematkan ini disebut menjadi hadiah seseorang ayah untuk anak perempuannya menjadi bentuk perlindungan terhadap anaknya agar tidak mengalami kejahatan yang dilakukan oleh calon suami ataupun mertua dalam pernikahannya. Hal ini berdampak kepada keadaan sosial serta ekonomi, mas kawin sudah menjadi momok yang seram terhadap wanita yang ada

di India. pada tahun 1961, mahar praktek menjadi liar sebab telah memakan korban (wanita), tapi hingga sekarang sistem ini masih tertanam pada budaya India. Di bawah perkembangan patriarki dan sistem ekonomi kapitalis, sistem mas kawin semakin banyak menjatuhkan korban, terutama wanita. Sejumlah data menyebutkan, setiap jam terdapat wanita India yg tewas sebab sistem ini, karena ketidaksanggupan wanita buat membayar mahar pada pernikahannya. Kekerasan dalam rumah tangga pun kerap kali terjadi sebab pesta pria dan keluarganya merasa tidak puas terhadap pembayaran mahar yg tidak mencukupi. tidak hanya itu, pada tahun 2006, UNICEF melaporkan bahwa 10 juta anak wanita mangkat baik sebelum dilahirkan ataupun selesainya lahir. Kelahiran anak perempuan sering disebut beban, sedangkan kelahiran bayi anak laki-laki dianggap membawa kemakmuran (*Dowry Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Di India - SULUH PEREMPUAN.Html*, n.d.).

Hak Asasi Manusia ialah dasar mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk perdamaian di dunia. HAM merupakan sebuah pedoman manusia bahwa semua orang berhak mendapat hal yang setara dalam bermasyarakat, sosial, budaya, ekonomi. Tentang pengabaian dan memandang rendah hak asasi manusia mengakibatkan terjadinya perbuatan keji yang menimbulkan kemarahan sesama manusia. Asas dasar adanya hak bagi perempuan ialah perspektif gender dan anti diskriminasi bahwa dalam berbagai bidang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama (*Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.Html*, n.d.).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di India hanya berlaku bagi orang kaya, jauh lebih banyak masyarakat miskin di India. Ada indikator signifikan yang menunjukkan bahwa India masih 'Negara Rapuh', indikator ini adalah masalah

internal negara seperti kemiskinan, kelaparan, kesenjangan ekonomi yang meningkat, pertumbuhan penduduk, jumlah pengungsi dan Pengungsi Internal, kelompok kekerasan dalam negara, korupsi dan ukuran lain dari kapasitas demokrasi, penyediaan pendidikan, perawatan kesehatan, sanitasi dan layanan lainnya. Keamanan manusia berarti, paling tidak, kebebasan dari kekerasan, dan dari ketakutan akan kekerasan. Masalah lainnya adalah bahwa populasi India yang berjumlah miliaran tidak hanya miskin tetapi juga sangat beragam. Ini terdiri dari campuran yang kaya dari etnis, budaya, dan agama. Kekerasan dalam rumah tangga menampilkan serangkaian ekstrim pelaku dan korban.

India bagian timur laut, lebih dari 10,000 orang telah tewas akibat kekerasan dalam dekade terakhir. Dalit, perempuan dan beberapa suku etnis minoritas tidak termasuk dalam penghitungan kemiskinan resmi karena mudah bagi politisi untuk mengumumkan pengurangan besar-besaran dalam kemiskinan hanya dengan tidak memasukkan mereka dalam sensus. Ada peningkatan terus-menerus dalam pelecehan perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir, organisasi non-pemerintah yang berbeda menyoroti masalah ini, tetapi pemerintah masih tidak dapat mengatasinya (Tariq, 2017).

Paradigma keamanan manusia telah berkembang pesat sejak didirikan sebagai alternatif dari kerangka keamanan tradisional. Terlepas dari berbagai argumen yang menentang peningkatan sekuritisasi masalah sosial ekonomi, keamanan manusia saat ini menyediakan serat moral untuk banyak kebijakan luar negeri, tindakan negara, dan intervensi internasional. Namun, di India kerangka negara sentris terus membuat pembuatan kebijakan. Ketika komunitas yang terkena dampak di India ini memberontak sebagai akibat dari hilangnya martabat atau akses

ke tanah, pemerintah hanya dapat melihat kerusakan tersebut sebagai masalah hukum dan ketertiban yang memerlukan tindakan polisi, daripada menerapkan tanggapan yang multidimensi. sebagai penyebab itu sendiri. (Tariq, 2017).

Dengan fenomena yang terjadi di India mengenai kesenjangan yang ada dalam bermasyarakat khususnya dialami oleh kaum perempuan. Dengan demikian perlu di teliti lebih jauh sebab dan akibatnya atas terjadinya krisis *Human security* yang menimpa dan merugikan kaum perempuan.

2. Identifikasi Masalah

India masih terjerat budaya patriarki sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat khususnya terhadap perempuan dalam kekerasan dan diskriminasi gender. Seharusnya India sudah lebih maju dalam aspek Keamanan Hak Asasi Manusia (*Human Security*) di era yang sudah di modernisasi karena banyak perempuan sadar dan memperjuangkan diri untuk mendapat Haknya sebagai perempuan yang utuh dan merdeka. Perempuan India memunculkan berbagai kampanye untuk di tunjukkan pada pemerintah juga masyarakat setempat sebagai salah satu bentuk protesnya terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan. Bahkan India sudah melakukan ratifikasi perjanjian internasional yang bertujuan untuk menunjukkan komitmen atas tanggung jawabnya dalam merealisasikan pengurangan kekerasan dan diskriminasi perempuan di India. Melalui prinsip Konvensi CEDAW, *UN Women* memiliki misi yang sama ialah ingin menghapus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Kasus yang masih marak terjadi di India yaitu pemerkosaan, kekerasan, bunuh diri akibat

tekanan dalam rumah tangga dan lingkungan, pembunuhan, pernikahan dini, aborsi bayi perempuan, diskriminasi agama/keyakinan individu, diskriminasi kasta sosial.

Dari paparan di atas penulis mencoba menarik beberapa aspek yang relevan dengan latar belakang masalah di atas untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pembahasan terkait, maka masalah yang diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di India?
2. Bagaimana Hubungan tentang Konvensi CEDAW dengan Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan di India?
3. Bagaimana UN Women Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan di India?

2.1. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya pembahasan yang akan diteliti serta untuk menjaga agar tidak biasnya masalah yang menjadi fokus Penelitian, maka Penulis membatasi dengan menitikberatkan pada “Peran *UN Women* mengimplementasikan, merealisasikan dengan pedoman/landasan *The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (Konvensi CEDAW) untuk mengurangi berbagai jenis kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh Perempuan India Periode 2018-2022.

2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas Penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana *UN WOMEN* dalam mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan di India?”**.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perempuan di India
- b. Untuk memberikan kesadaran kepada sesama agar Women Support Women mengetahui bagaimana Konvensi CEDAW direalisasikan untuk pemberdayaan juga perkembangan perempuan di negara India
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari peran *UN Women* dalam mengatasi terkait dengan tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan yang ada di India
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor dan hambatan yang dilalui negara India dalam mengurangi tingginya angka tindakan kekerasan terhadap perempuan India

3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. kegunaan teoritis dari Penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai langkah-langkah dan peran *UN WOMEN* dalam mengimplementasikan konvensi CEDAW dalam Pengurangan Kekerasan Perempuan di India.

2. Kegunaan Praktis dari Penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab dalam menempuh program studi S-1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan untuk lulus pada program studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung;
- b. Dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi, juga pada Penulis khususnya;
- c. Dapat memberikan informasi kepada pihak lain yang berminat untuk meneliti masalah yang diangkat dalam Penelitian ini dan menjadi referensi bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut.